

RESOLUSI PEMERINTAH DALAM MENGENTASKAN ANGKA PENGANGGURAN TERHADAP PERBAIKAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KABUPATEN CILACAP

Bellany Betta¹, Mudham Tabrani², Hendra Lana Saputra³

**Dosen Pendamping Yuni Kurniasih, S.A.P.,
M.Si.**

^{1,2}Universitas Tidar; Jl. Kapten Suparman No. 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116, Telp (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang

E-Mail: *¹bellany.betta002@gmail.com,

²mudhamtabrani90@gmail.com, ³hendralana226@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengangguran yang mengakar kuat di Kabupaten Cilacap dan peran pemerintah melalui kebijakan dan pelayanan sosialnya dalam meminimalisir tingginya angka pengangguran. Pengangguran merupakan suatu permasalahan sosial yang kian marak terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengangguran adalah kondisi di mana orang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bekerja maupun seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi permasalahan serius yang harus dibenahi. Salah satu daerah yang memiliki angka pengangguran tertinggi adalah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, tingkat pengangguran dari tahun 2019-2021 berada pada intensitas naik yakni pada tahun 2021 sebesar 82 714,00 dengan persentase TPT mencapai 9,97%. Oleh karena itu hal ini menjadi topik yang sangat penting dan menarik untuk dianalisis dan dideskripsikan secara lebih mendalam terkait Resolusi Pemerintah Dalam Mengentaskan Angka Pengangguran Terhadap Perbaikan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kabupaten Cilacap. Menggunakan metode literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Cilacap masih sangat tinggi dan peran pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran sudah diupayakan di mana pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2022 sekitar 5,5 – 5,9 persen dengan keberhasilan pemerintah meningkatkan usaha mikro sebesar 3,31% dari tahun 2021 hingga 2022 melalui beberapa kebijakan dan pelayanan sosial yang diberikan seperti, Peraturan pemerintah daerah tentang kerja lokal yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Cilacap, Pengembangan Potensi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), Pemberdayaan pemuda oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap, Pengurangan pengangguran remaja karang taruna dengan pelatihan produk dan lain sebagainya. Dengan demikian pemerintah berperan penting dalam pemenuhan lapangan pekerjaan dan pelatihan kualitas dan kompetensi masyarakat atau tenaga kerja.

Keywords : pengangguran, kebijakan sosial, kesejahteraan sosial, resolusi pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau orang-orang yang tidak memiliki suatu pekerjaan dan dalam kondisi sedang mencari pekerjaan serta tenaga kerja yang dalam keadaan setelah kehilangan pekerjaan. Pengangguran menurut (Permadhy, 2020) adalah sesuatu kondisi seseorang yang terkategori sebagai angkatan kerja ingin

memperoleh pekerjaan namun belum bisa mendapatkannya. Sedangkan mengutip dari pendapat yang dikemukakan oleh (Setiawan, 2013: 2) mengemukakan bahwa terjadinya pengangguran dikarenakan akibat tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang memadai serta persentase penyerapan tenaga kerja yang relatif minim. Dengan hal ini bahwa

keterbatasan lapangan pekerjaan serta kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan masih menjadi pemicu menguatnya angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran menjadi akar permasalahan sosial yang tidak kunjung tuntas.

Lebih lanjut selama pandemi covid-19 melanda Indonesia dampak sosial yang banyak dirasakan oleh masyarakat adalah dengan kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian sehingga hal tersebut menambah data angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Menurut Kemenaker mencatat 1,4 juta orang kehilangan pekerjaan imbas pandemi (Sembiring & Sandi, 2020). BPS mencatat terjadinya penurunan tingkat pengangguran Indonesia yakni 6,5 persen pada Agustus 2021. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah pada Agustus 2020 yang mencapai 7,1 persen.

Hal ini pun terjadi pada Kabupaten Cilacap yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 1,94 juta jiwa yang di mana masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pedagang, dan peternak ternyata menjadi salah satu wilayah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi (Kusnandar, 2021). Di mana tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap pada data tahun terakhir yakni pada tahun 2021 mampu menembus 82 714,00 atau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar

9,97% (BPS, 2021-2023). Hal tersebut yang kemudian menyebabkan Kabupaten Cilacap sebagai wilayah yang memiliki angka pengangguran tertinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya yakni pada data tahun 2019 tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap mencapai 61 548,00 dengan persentase TPT sebesar 7,24% kemudian melesat naik pada tahun berikutnya di tahun 2020 mencapai 80 811,00 dengan persentase TPT sebesar 9,10%. Banyaknya pengangguran yang menjamur di berbagai wilayah terlebih khusus pada Kabupaten Cilacap menjadi permasalahan sosial yang sulit dipecahkan sehingga berakibat pada tingginya kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dilansir dari Cilacap.go.id tingkat penduduk miskin mencapai puncaknya di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 sebesar 11,67%. Kemudian angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang semula dari 1,20% meningkat sekitar 2,19%.

Ketidakterediaan lapangan pekerjaan yang memadai atau terbatas yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi disinyalir menjadi faktor utama akar pengangguran di Kabupaten Cilacap sulit diturunkan dan dibenahi. Berdasarkan data Kabupaten Cilacap pada tahun 2021

jumlah Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 747 329,00, sedangkan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 82 714,00. Di sisi lain banyaknya remaja yang baru tamat sekolah yang tersebar di berbagai desa yang tidak dibekali dengan kemampuan dan keterampilan dalam dunia pekerjaan menambah daftar angka pengangguran semakin tinggi dan menjadi salah satu faktor yang banyak ditemui dan terjadi di berbagai daerah, hal itu pun menjadi salah satu faktor sulitnya memecahkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data daftar angka pengangguran terbuka sesuai dengan tingkat Pendidikan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 pada kategori Pendidikan Dasar ke Bawah berada pada angka 8,24% sedangkan pada tahun 2020 hanya 6,74%. Pada jenjang Pendidikan Tinggi tahun 2020 berada pada kisaran 4,95% meningkat pada tahun 2021 sebanyak 7,76%.

Pemerintah merupakan aktor yang memegang peranan penting dan memegang kendali dalam upaya meminimalisir tingginya angka pengangguran di Kabupaten Cilacap. Bagaimana pun masyarakat menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi dari taraf kesejahteraan sosialnya, baik dari segi kebutuhan sandang, pangan dan papan ataupun pembekalan keterampilan pelatihan ketenagakerjaan. Sebagaimana yang pada pasal 27 ayat (2) dijelaskan

bahwa setiap masyarakat berhak untuk memperoleh akses pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghidupan yang sesuai bagi kemanusiaan.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian terdahulu yang relevan diketahui bahwa pengangguran di Kabupaten Cilacap sebagian besar terjadi pada golongan remaja hingga dewasa yang pada kenyataannya hanya tamatan SD, SMP, dan SMA saja atau bahkan sebagian putus sekolah yang notabenehnya belum cukup memiliki keahlian untuk terjun ke dunia pekerjaan sehingga hal tersebutlah yang menjadi akar lahirnya pengangguran. Minimnya kualitas kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya pun juga turut berpengaruh terhadap peningkatan angka pengangguran di Kabupaten Cilacap.

Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Cilacap dapat diminimalisir apabila pemerintah berperan besar di dalamnya dalam meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia melalui berbagai bentuk program pelayanan sosial dan kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dengan menurunnya tingkat pengangguran maka secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap pun akan berangsur membaik. Upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal esensial yang

masih menjadi ranah pertanggungjawaban pemerintah dalam memperbaiki kualitas taraf kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan pelayanan sosial yang bersinergi terhadap partisipidan kolaborasi masyarakat memungkinkan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat manakala jika sumber daya manusianya mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang ada dengan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi dan data-data secara lebih mendalam guna mengetahui pengangguran yang ada di Kabupaten Cilacap dan bagaimana peran pemerintah dalam berupaya mengentaskan angka pengangguran di Kabupaten Cilacap melalui berbagai bentuk kebijakan atau program pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat yang berimplikasi terhadap perbaikan taraf kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Cilacap.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode *literatur review*. Di mana dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan serta memperoleh sumber data sekunder baik yang berasal dari berbagai kajian literatur media digital, seperti melakukan tinjauan dari beberapa hasil jurnal penelitian Bellany,dkk - Resolusi Pemerintah Dalam.....

terdahulu yang relevan dengan topik ini, atau sumber dokumen terkait yakni seperti artikel ilmiah, serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini ditunjukkan agar peneliti dapat memperoleh sumber data informasi secara akurat, sistematis dan faktual sehingga data yang disajikan dapat memperkuat hasil dan pembahasan mengenai kondisi pengangguran dan peran pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan dan pelayanan sosial di Kabupaten Cilacap. Dengan demikian melalui metode penelitian *literature review* ini peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan objek ataupun fenomena pengangguran yang terjadi di Kabupaten Cilacap secara lebih mendalam dan menekankan pada makna yang berpatokan pada data yang ada.

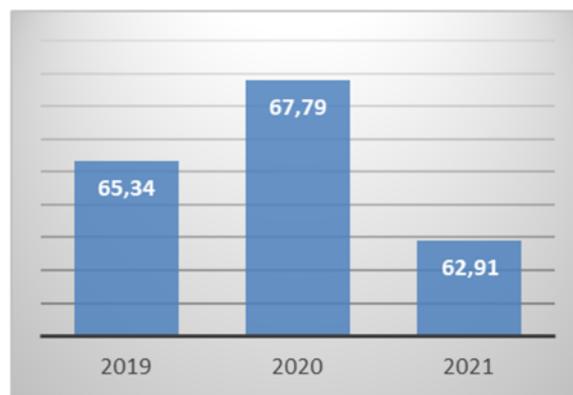
Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah meliputi *data collection* atau pengumpulan data di mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber data informasi yang dibutuhkan melalui berbagai media elektronik ataupun media fisik seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah lain sebagainya yang relevan dan mendukung penulisan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah pengangguran merupakan

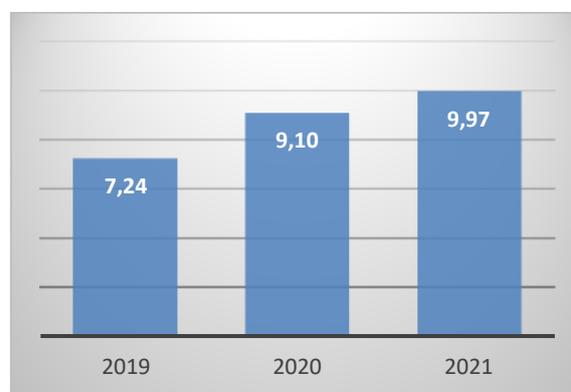
salah satu masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya (Yehosua, dkk., 2019) Terjadinya pengangguran disebabkan karena kondisi ekonomi, kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah bahkan tidak memiliki keterampilan dan lain sebagainya. Namun akhir-akhir ini banyak pengangguran disebabkan adanya pandemi yang sudah berdampak ke berbagai negara salah satunya Indonesia. Semenjak masuknya Covid di Indonesia banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena banyaknya perusahaan yang dengan terpaksa mereka melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Fenomena tersebut yang akhirnya membuat peningkatan pengangguran di Indonesia salah satunya di wilayah Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk 1.963.824 jiwa. Menurut BPS Kabupaten Cilacap tingkat partisipasi Angkatan Kerja sebagai berikut:

**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA (TPAK)**



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cilacap 2019-2021

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Cilacap 2019-2021

Dilihat dari grafik di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 67,79% menjadi 62,91% hal tersebut diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan dari 9,10% menjadi 9,97%. di sisi lain peningkatan pengangguran tersebut karena adanya pandemi covid, menurut Pemkab Cilacap mencatat terdapat 1.377 karyawan yang kehilangan pekerjaan yang terdiri dari 649 korban PHK dan 728 dirumahkan (Setiawan, 2020). Hal tersebut membuat tingkat pengangguran di Kabupaten

Cilacap meningkat karena banyaknya masyarakat yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Di mana biasanya masyarakat Cilacap yang bekerja sebagai buruh, karyawan, dan pegawai mereka bisa mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sekarang mereka mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah bahkan terdapat masyarakat yang memilih untuk berhenti jualan.

Pengangguran di Cilacap terjadi karena banyak pelajar SMA/SMK yang baru lulus belum mendapatkan pekerjaan, hal tersebut karena penduduk yang berusia muda memilih untuk menunggu mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Biasanya lulusan SMK/SMA yang ingin bekerja, mereka bekerja di sektor industri sebagai pekerja pabrik. Lulusan SMK memang disiapkan untuk menopang kegiatan produksi di sektor industri. Sementara di lapangan pekerjaan di sektor industri Cilacap. Dengan kata lain, seseorang yang belum menikah akan cenderung memilih menganggur jika dibandingkan dengan seseorang yang sudah menikah karena mereka memiliki tanggungan keluarga baik istri, suami ataupun anak (Hidayatulloh, 2017). Sedangkan seseorang yang belum menikah mereka tidak terlalu banyak memiliki tanggung jawab atas yang besar terhadap keluarga. Di sisi lain pengangguran terdidik meningkat karena semenjak adanya covid mencari pekerjaan susah sehingga mereka memilih untuk di rumah terlebih dahulu.

Meskipun di Cilacap sudah terdapat industri yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Cilacap namun yang terjadi Di lapangan industrialisasi di Cilacap justru tanpa diikuti oleh kesiapan tenaga kerja setempat untuk ikut dalam berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, tidak sedikit dari perusahaan industri yang kemudian menarik tenaga kerja dari luar Cilacap. Seperti yang diungkapkan oleh Irawan (2002:444) bahwa, perkembangan industri di Cilacap yang menyerap banyak tenaga kerja seperti PT Pelindo III Persero, PT Toxindo Prima, PT Lautan Murti, PT Semen Holcim Cilacap, PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, dan lain sebagainya ternyata justru tenaga kerja yang berasal dari luar daerah yang mendapatkan pekerjaan di sektor tersebut dari pada tenaga kerja lokal.

Peningkatan angka pengangguran di Cilacap yang semakin tinggi nantinya akan berdampak terhadap individu masyarakat yang mengalaminya (Mahdar,2015) yaitu

1. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian seseorang yang menganggur akan kehilangan sumber pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Hilangnya mata pencaharian dan pendapatan akan menimbulkan kerawanan sosial karena setiap individu dituntut untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya,

2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan

Seseorang yang sudah menganggur lama mereka akan kehilangan keterampilan karena keterampilan yang sudah dimiliki sudah tidak lagi ditekuni

3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik

Sering terjadi untuk masyarakat yang menganggur mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun mereka tidak ingin berusaha sehingga lebih memilih untuk melakukan tindakan kriminal seperti melakukan perampokan, pencopetan. Pengangguran yang tinggi juga akan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat sehingga dapat menimbulkan unjuk rasa, demonstrasi sehingga keadaan politik menjadi tidak stabil.

Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam upaya solusi pengurangan pengangguran di Kabupaten Cilacap:

1. Peraturan Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap Ketua Bapemperda DPRD Cilacap Harun Arrasyid dalam *public hearing* naskah akademik raperda tentang penempatan kerja lokal ini sebagai payung hukum masyarakat Cilacap. Pasalnya, Cilacap yang menjadi

daerah yang pro investasi dengan banyaknya berdatangan perusahaan membangun, akan tetapi masyarakat tidak sedikit yang menganggur. Peraturan ini memuat bahwa pekerja lokal di Kabupaten Cilacap harus diprioritaskan bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada di Cilacap. Minimal 70 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut (A. Kurniawan, 2019). Dengan adanya perda ini nantinya bisa menempatkan sekitar 70 persen tenaga lokal di perusahaan-perusahaan yang dibangun di Cilacap. Apabila ada perusahaan yang tidak menepati aturan, maka akan ada sanksi yang diberikan. Adanya perda ini nantinya agar perusahaan yang harus berkoordinasi dengan Pemkab terkait dengan perekrutan tenaga kerja. Pasalnya masih ada perusahaan yang merekrut tenaga dari luar Cilacap. Padahal bangunan fisik dari perusahaan tersebut berada di wilayah Cilacap. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap mengatakan dengan adanya perda inisiatif ini, diharapkan melindungi tenaga asli masyarakat Cilacap dengan menempatkan mereka di perusahaan atau di proyek pembangunan. Di berbagai perusahaan juga

memperhatikan kesejahteraan para pekerja lokal tersebut sehingga masyarakat lokal juga mendapatkan prioritas dan berdampak sejahtera.

Dengan adanya kebijakan tersebut, salah satu proyek yang berada di Cilacap yaitu Proyek PLTS Pertamina di Kilang Cilacap menyerap tenaga lokal sekitar 67% dari total kebutuhan (Kencana, 2021). Tidak hanya itu, Kabupaten Cilacap yang sedang melakukan pembangunan Kawasan Industri, Presiden Direktur PT KIC dan Wiwaha Group, Joko Prabowo menjelaskan bahwa pada tahap awal, proyek ini mampu diperkirakan menyerap lebih dari lima ribuan tenaga kerja lokal. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Industri Cilacap untuk menggelar pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek besar tersebut.

2. Pengembangan Potensi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)

Wakil ketua DPRD, Saiful Musta'in melakukan konsultasi dan peninjauan tentang potensi pembangunan Kawasan industri hasil tembakau di Kabupaten Cilacap (Bea Cukai, 2020). Dengan angka pengangguran yang tinggi di Cilacap pengembangan KIHT dapat menjadi solusi dan berencana akan menyesuaikan rencana

tata ruangnya. Di timpali oleh kepala kanwil Bea Cukai Jateng DIY, membuah janji bahwa akan membantu sepenuhnya rencana implementasi KIHT di Kabupaten Cilacap. Rencana yang akan digunakan juga harus dimatangkan terlebih dahulu terutama apabila akan menggunakan anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. DPRD bisa melakukan pendekatan dan mendorong pemda setempat untuk merealisasikan KIHT mulai dari awal sampai akhir. Dengan adanya KIHT ini maka potensi pengusaha yang ilegal akan menjadi legal. Kepala bidang kepabeanan dan cukai memaparkan bahwa KIHT maka dapat mengembangkan industri pendukung, memudahkan pengawasannya dan akan memudahkan penerimaan lapangan pekerjaan dari tenaga kerja masyarakat Cilacap.

Ada juga solusi masyarakat yang bersifat nonformal dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Cilacap:

1. Pemberdayaan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap.

PT Pertamina Refinery Unit IV Cilacap, termasuk dalam bagian dari PT Pertamina yang telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka melaksanakan program CRS. Salah satu kegiatan CSR ini adalah melakukan pemberdayaan

masyarakat.

Berdasarkan (KSM, 2021) Pejabat sementara atau Pjs. Area *Manager Communication, Relations, & CSR* PT KPI Unit Cilacap, Ibnu Adiwena membuka pelatihan las listrik 6G di balai Latihan kerja (BLK), Jalan Nusantara Cilacap. Program tersebut merupakan agenda rutin *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bergulir sejak 10 tahun lalu. Sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, terobosan ini bisa diikuti oleh kaum muda di usia produktif dan merupakan bentuk kemitraan dan sinergi lintas institusi dalam menciptakan peluang masa depan yang lebih baik bagi Angkatan kerja di Cilacap. Program ini juga meliputi berbagai rangkaian program yang bisa diikuti sebaik-baiknya demi menghasilkan alumni pelatihan yang terbaik. Ketika peserta pelatihan lolos dari program ini patut untuk bersyukur. Pelatihan las level tertinggi 6G diberikan secara gratis untuk membekali masa depan pemuda. Program ini menuai banyak pro dan sebagai upaya untuk mengentaskan pengangguran di usia produktif. Kepala BLK Cilacap, Guntoro Sejati menyebutkan kegiatan berlangsung selama 3 bulan dengan persentase 30% teori dan 70% praktik (Nastuti, 2021). Pelatihan ini bisa dibilang strategis karena permintaan tenaga ahli las dari

Cilacap selalu tinggi dari perusahaan-perusahaan besar (KSM, 2021). Dari berbagai alumni yang pernah mengikuti program pelatihan ini merasa puas karena tanggung jawab dalam penyaluran tenaga kerja dan setelah mengikuti pelatihan ini sangat penting sebagai bekal untuk masuk dunia kerja.

Program pemberdayaan yang disediakan PT Kilang Pertamina Cilacap tidak hanya pemberdayaan Las Listrik 6G saja yang namun terdapat pemberdayaan masyarakat lainnya seperti Pelatihan Manajemen Usaha, Pelatihan Hasil Olah Pangan, Pelatihan Abon Ikan, Pelatihan Teknisi Komputer, Pelatihan Budidaya Kambing, dan Pelatihan Budidaya Kepiting. Program Pelatihan Pemberdayaan yang telah dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Cilacap ini telah berjalan dengan dinamis dan bahkan telah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat 1 tanggung jawab sosial dunia usaha tingkat Provinsi Jawa Tengah 2013. Bahkan menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, yaitu Tetty Rohatiningsih menyebutkan bahkan program CRS yang diluncurkan Pertamina diyakini semakin menggairahkan masyarakat dimasa pandemi (Jateng Antara News,

2022).

2. Pengurangan pengangguran remaja karang taruna dengan pelatihan produk

Program dari sosialisasi ini dilaksanakan oleh tim PKM dengan berbagai tahapan meliputi survei lapangan, sosialisasi program, pelatihan pembuatan produk, mengolah dan memasarkan produk, pemberian bantuan peralatan, pendampingan usaha, dan pelatihan manajemen usaha. Salah satunya survei yang dilakukan di daerah Tritih Lor Kabupaten Cilacap ini persebaran pohon pisang sangat luas dan dinilai berpotensi dalam mengembangkan pohon pisang ini sebagai bahan dari pelatihan usaha produksi. Produk yang telah direncanakan dinamai dengan produk banachips. Sosialisasi yang dilakukan diharapkan para pemuda dan masyarakat di daerah ini bisa bersama-sama memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa. Sosialisasi dilakukan untuk memberi motivasi agar menimbulkan kesadaran diri dan optimis untuk menjadi wirausahawan. Salah satu inovasi ini juga dikarenakan banyak anggota pemuda karang taruna yang hanya fokus keaktifannya di kegiatan olahraga dan kerohanian saja.

Dengan adanya pelatihan dari banachips ini juga diharapkan untuk

menambah penghasilan lain bagi yang masih menganggur. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan chef sebagai pembimbing utama sedangkan pembimbing lain ada dosen dan lain-lain. Pelatihan dilakukan secara terpusat di Balai Desa. Pemasaran produk dilakukan bersama pemuda karang taruna dan bisa menambah pengalaman dan pembelajaran bagi yang lain. Bantuan peralatan juga diberikan sebagai salah satu penunjang sarana dari pelatihan dan pendampingan usaha dilakukan untuk menjamin materi yang telah disampaikan apakah benar-benar diaplikasikan dengan baik atau tidak dan setelah itu dilakukan evaluasi masalah dalam berbagai tahapan yang dilalui lalu memperbaikinya.

Semua kegiatan pelatihan produk ini, menghasilkan remaja yang lebih mengetahui cara pembuatan banachips dan juga melakukan pemasaran secara langsung sehingga kegiatan ini terbukti berhasil. Semenjak dilakukan pemberdayaan pembuatan banana chips, akhirnya sudah banyak masyarakat yang menjual berbagai varian rasa banana chips dan masih berjalan hingga saat ini.

3. Pelatihan las listrik dasar

untuk masyarakat usia produktif

Kegiatan ini diawali dengan survei kepada pemuda usia produktif di Desa Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah serta ditambah dengan potensi desa bahwa jumlah usia produktif sangat banyak dan apabila tidak dibekali dengan pelatihan kerja maka pengangguran dapat menjadi masalah. Banyak pemuda dari Desa Sidanegara yang lulus SMK yang tidak langsung bekerja dan cenderung menunggu proyek-proyek tawaran dari berbagai perusahaan besar dan mengakibatkan masa tunggu kerja itulah yang menyebabkan pengangguran. Karena belum tentu pemuda lulusan tersebut semuanya mendapatkan tawaran pekerjaan. Berbagai tahapan dalam melakukan pelatihan ini dibutuhkan kreativitas dan ketekunan dan indikator dari keberhasilan tersebut bisa dilihat dari pemahaman penjelasan SMAW, Penyetelan arus mesin las SMAW saat pengelasan, penyalaan dan mematikan usur las secara benar, pengelasan titik dengan benar dan pengelasan sambungan secara benar termasuk membuat produk hasil pengelasan mandiri dengan mengembangkan kreativitas masing-masing peserta pelatihan. Ada juga tahap evaluasi dalam kegiatan pelatihan dan tahapan dari semua

pelatihan ini ada 1 bulan setelah pelatihan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Dalam berbagai tahapan yang dilalui dalam mengikuti pelatihan sangat diharapkan dapat menjadi perbekalan dalam menghadapi dunia kerja yang diinginkan dan untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di masyarakat di usia produktif.

Menurut (I. Kurniawan & pujono, 2020), Dalam berbagai tahapan yang dilakukan, para peserta bisa melaksanakan berbagai tahapan dengan baik dan bisa menyesuaikan dengan yang dipelajarinya semasa pelatihan. Semua peserta memiliki keinginan lebih untuk belajar dan keaktifannya terbukti dengan baik selama pelatihan hal tersebut dibuktikan ketika mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir terlaksananya pelatihan (I. Kurniawan & pujono, 2020).

4. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Merupakan salah satu Pendidikan nonformal yang berdiri di bawah naungan direktorat pembinaan kursus dan pelatihan. Pendirian dari LKP sebagai bagian dari Pendidikan nonformal yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 2 Nomor 81 Tahun 2013. Pendirian dari LKP bisa didirikan oleh perorangan, dua orang maupun kelompok. LKP juga harus memenuhi berbagai syarat dan kriteria saat akan mendirikannya dan pendiri dari LKP harus benar-benar orang yang kompeten dan memiliki jiwa untuk mewadahi pengembangan kemampuan dan keterampilan orang lain.

Dalam pelaksanaan LPK, kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum dari Kemendikbud dan harus memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kecukupan dari fasilitas LKP sendiri. LKP yang merupakan buatan dari masyarakat dan untuk masyarakat sangat dibutuhkan untuk kontribusi dalam pembangunan nasional. LPK yang sangat cocok dengan kondisi masyarakat yaitu dibidang teknologi digital dikarenakan banyak pekerjaan saat ini yang menggunakan teknologi untuk menunjang kemudahannya. Pendirian dari LKP sendiri yaitu diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran yang tinggi di berbagai daerah di Indonesia.

Adapun Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) yang berada di Kabupaten Cilacap yaitu SWK Komputer, Setia Cipta Mekanik, Budi Utomo, IP Nahdiatul Ulama, Master

Korea dan masih banyak lagi. Di kabupaten Cilacap saat ini masih banyak LKP yang beroperasi dan penting keberadaannya untuk menunjang perbekalan masyarakat yang membutuhkan keterampilan sebelum masuk ke dunia kerja. Menurut penelitian relevan yang dituliskan oleh Kardianto Indra Purnomo "Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia Pada Lembaga Kursus Sebagai Upaya Meningkatkan Tenaga Professional (STUDI Kasus pada Lembaga-lembaga Kursus di Kabupaten Cilacap

Namun tidak semua LKP di Kabupaten Cilacap tidak semuanya mempunyai kompetensi dalam memberikan pembelajaran kepada didik nya (Purnomo, n.d.). Hal tersebut di karenakan pengelola lembaga kursus dan pelatihan di Kabupaten Cilacap, masih banyak yang belum bahkan tidak memperhatikan kualitas instruktur dengan mengikuti ujian kompetensi (Purnomo, n.d.) yang menyebabkan siswa/peserta didik kursus di Kabupaten Cilacap, masih banyak yang belum terpikirkan untuk diikutsertakan dalam uji kompetensi sehingga peserta didik dipastikan akan kalah bersaing dalam memperoleh pekerjaan.

4. SIMPULAN

Pengangguran menjadi permasalahan yang krusial sampai saat ini yang harus segera dipecahkan karena berdampak pengangguran tidak hanya merugikan bagi suatu perekonomian negara, tetapi bagi individu dan masyarakat, seperti mereka akan kehilangan mata pencaharian, menghilangkan keterampilan bahkan akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap masih sangat tinggi. Dengan demikian peran pemerintah dalam menciptakan sebuah resolusi melalui kebijakan dan pelayanan sosialnya berpengaruh terhadap perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan beberapa program, yang bertujuan mengatasi pengangguran di wilayah Kabupaten Cilacap pemerintah membuat kebijakan antara lain:

1. Peraturan pemerintah daerah tentang penempatan kerja lokal yang merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Cilacap

2. Pengembangan Potensi kawasan industri hasil tembakau.

Adapun Solusi Masyarakat:

1. Pemberdayaan pemuda oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap.
2. Pengurangan pengangguran remaja karang taruna dengan pelatihan produk.
3. Pelatihan las listrik dasar untuk masyarakat usia produktif
4. Lembaga kursus dan pelatihan (LKP)

Dengan begitu, kebijakan pemerintah yang Bellany,dkk - Resolusi Pemerintah Dalam.....

sudah dilakukan seharusnya juga didukung oleh masyarakat Kabupaten Cilacap dengan mengikuti dan berpartisipasi pada setiap kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

2021-2023, B. (n.d.). *Tingkat Penganggurann Terbuka Kabupaten Cilacap*. Cilacapkab.Bps.Go.Id.

Antara, J. N. (2022). *Luncurkan Program CSR, Pertamina Cilacap dorong warga Donan makin produktif dan berdikari*. Jateng.Antaraneews.Com.

Cukai, A. W. B. dan. (2020). *JEJAKI POTENSI KIHT DI CILACAP, DPRD KABUPATEN CILACAP SAMPANGI BEA CUKAI*. Beacukai.Go.Id. <https://www.beacukai.go.id/berita/jajaki-potensi-kiht-di-cilacap-dprd-kabupaten-cilacap-sampangi-bea-cukai.html>

Hidayatulloh, M. I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tanggungan Keluarga, dan Status Pernikahan Terhadap Keputusan Perempuan Bekerja (Studi Pada Desa Trawasan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang). *Journal Universitas Brawijaya*.

Kencana, M. R. B. (2021). *Proyek PLTS Pertamina di Kilang Cilacap Serap Tenaga Lokal 67 Persen*. Liputan6.Com.

KSM. (2021). *Kilang Pertamina Cilacap bekal kaum muda dengan keterampilan las listrik 6G*. Jatengantaraneews.

Kurniawan, A. (2019). *Investasi di Cilacap Capai 7 Triliun, Angka Pengangguran Masih Tinggi*. Serayunews.

Kurniawan, I., & pujono, pujono pujono. (2020). Pelatihan Las Listrik Dasar Untuk Masyarakat Usia Produktif Lingkungan Rw 10 Desa Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. *Journal of Appropriate Technology for Community Services*, 1(2), 91–99. <https://doi.org/10.20885/jattec.vol1.iss2.art5>

Kusnandar, V. B. (2021). *Penduduk Kabupaten Cilacap Pada Tahun 2020*. Databoks.

Nastuti, A. (2021). *Dukung Penurunan Angka Pengangguran Kilang Pertamina Cilacap Bekal Kaum Muda dengan Skill Las Listrik 6G*. Bercahayafm.Cilacapkab.Go.Id.

Purnomo, K. I. (n.d.). Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia Pada Lembaga Kursus Sebagai Upaya Meningkatkan Tenaga Professional. *Academia.Edu*, 1–16. https://www.academia.edu/download/53304533/PEN_GEMBANGAN_SUMBER_DAYA_MANUSIA_IN_DONESIA_PADA_LEMBAGA_KURSUS_SEBAGAI_UPAYA_MENINGKATKAN_TENAGA_PROFESSIONAL.pdf

Sembiring, L. J., & Sandi, F. (2020). *Menaker: 1,5 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan Karena Covid-19*. CNBC Indonesia.

Setiawan, M. Y. (2020). *Korban PHK di Pastikan Dapat Bantuan di Cilacap, Disnakerin: Sudah Diusulkan ke Pemprov Jateng*. Tribunbanyumas.

